

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN E-GOVERNMENT DALAM MENINGKATKAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PEMERINTAHAN

Nabila Mukarromah¹, Anggini Pratiwi², Stela Eka Listiani³, Hayat⁴
Email: mukarromahn372@gmail.com¹, anggi130304@gmail.com²,
stelaekalistiani@gmail.com³, hayat@unisma.ac.id⁴

Universitas Islam Malang

Abstrak: Penerapan e-Government di Indonesia bertujuan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam tata kelola pemerintahan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. E-Government menyediakan layanan publik berbasis digital (e-Services), meningkatkan manajemen administrasi internal (e-Administration), dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan (e-Democracy). Implementasi ini memperkuat prinsip good governance dengan mengurangi potensi korupsi dan meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi pemerintah. Melalui sistem seperti e-budgeting dan e-procurement, pemerintah dapat memastikan keterbukaan data anggaran dan program kerja. Partisipasi publik difasilitasi melalui platform interaktif yang memungkinkan warga memberikan masukan dan memantau kinerja pemerintah secara langsung. Namun, tantangan seperti kesenjangan digital dan rendahnya literasi teknologi menjadi kendala utama. Dengan pembangunan infrastruktur teknologi yang merata, regulasi yang mendukung, dan edukasi publik, e-Government dapat menjadi pilar utama dalam mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel.

Kata Kunci: E-Government, Transparansi, Akuntabilitas, Good Governance, Teknologi Informasi.

***Abstract:** The implementation of e-Government in Indonesia aims to improve transparency, accountability, and efficiency in governance through the utilisation of information and communication technology. E-Government provides digital-based public services (e-Services), improves internal administrative management (e-Administration), and encourages public participation in decision-making (e-Democracy). This implementation strengthens the principles of good governance by reducing the potential for corruption and improving public access to government information. Through systems such as e-budgeting and e-procurement, the government can ensure transparency of budget data and work programmes. Public participation is facilitated through interactive platforms that allow citizens to provide feedback and monitor government performance directly. However, challenges such as the digital divide and low technological literacy are major obstacles. With equitable technological infrastructure development, supportive regulations, and public education, e-Government can be a key pillar in realising responsive, transparent, and accountable governance.*

***Keywords:** E-Government, Transparency, Accountability, Good Governance, Information Technology.*

PENDAHULUAN

Di tengah pesatnya era digital, pemerintah di berbagai negara, termasuk Indonesia, dituntut untuk meningkatkan efisiensi, keterbukaan, dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan administrasi publik. Salah satu strategi untuk mewujudkannya adalah dengan menerapkan kebijakan e-government, yaitu pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam tata kelola pemerintahan.

Langkah ini bertujuan memberikan layanan yang lebih cepat, transparan, dan tepat sasaran kepada masyarakat sekaligus menciptakan pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan publik (Batuara et al., 2022).

Transparansi sering kali menjadi isu utama yang memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Melalui e-government, masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi tentang kebijakan, anggaran, dan program pemerintah secara daring. Dengan keterbukaan ini, masyarakat memiliki peluang untuk memantau kinerja pemerintah dan memberikan masukan yang membangun. Selain itu, e-government juga dapat mengurangi risiko korupsi karena setiap keputusan dan penggunaan anggaran dapat dipantau secara real-time oleh masyarakat dan otoritas terkait (Syuaib et al., 2023).

Akuntabilitas juga menjadi elemen penting dalam kebijakan ini. Implementasi e-government memungkinkan pemerintah menunjukkan tanggung jawab atas setiap tindakan, terutama terkait pengelolaan anggaran publik. Sistem seperti e-budgeting, e-audit, dan e-procurement membantu menciptakan transparansi dengan menyediakan rekam jejak yang dapat dinilai secara objektif oleh pihak yang berkepentingan (Musri et al. 2024). Penerapan e-government menghadapi berbagai tantangan. Kesenjangan digital menjadi kendala utama, terutama karena tidak semua masyarakat memiliki akses yang memadai terhadap teknologi. Selain itu, literasi digital yang rendah di beberapa wilayah dapat menghambat keberhasilan program ini. Oleh karena itu, diperlukan pembangunan infrastruktur teknologi yang merata dan program edukasi bagi masyarakat serta aparatur pemerintah untuk mendukung implementasi sistem digital ini (Anita & Astuti, 2022).

Di Indonesia, inisiatif seperti Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) telah diluncurkan untuk mendukung e-government. SPBE bertujuan memperkuat integrasi data antarinstansi, menyederhanakan pelayanan publik, dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah. Dengan pendekatan yang menyeluruh, e-government diharapkan mampu mewujudkan pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan mendapat kepercayaan publik (Ramadhania & Sutisna, 2023).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk menganalisis penerapan kebijakan e-government dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti menggali secara mendalam proses, dinamika, serta tantangan yang muncul selama implementasi kebijakan tersebut. Lokasi penelitian difokuskan pada instansi pemerintah yang telah mengadopsi sistem e-government, dengan perhatian khusus pada platform atau aplikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi publik dan akuntabilitas (Pertiwi et al., 2021).

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan para pejabat pemerintah, analisis dokumen kebijakan, serta observasi langsung terhadap penggunaan sistem e-government. Wawancara bertujuan memahami pandangan dan pengalaman praktisi dalam melaksanakan kebijakan, sementara analisis dokumen bertujuan mengevaluasi kesesuaian antara kebijakan tertulis dengan praktiknya. Observasi langsung digunakan untuk mengidentifikasi kendala teknis dan operasional yang muncul dalam pelaksanaan sistem. Untuk memastikan keakuratan data, teknik triangulasi digunakan dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode analisis tematik, yang

memungkinkan pengelompokan isu-isu utama terkait transparansi dan akuntabilitas. Penelitian ini juga menilai sejauh mana kebijakan e-government berkontribusi terhadap keterbukaan informasi publik, akses masyarakat terhadap layanan pemerintah, serta efisiensi dalam pelaporan akuntabilitas (Yunus et al., 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian dan Tujuan E-Government

E-Government, atau pemerintahan elektronik, merupakan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam administrasi publik untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas layanan pemerintah kepada masyarakat, dunia usaha, serta pemangku kepentingan lainnya. Dengan mengubah proses manual yang sering kali lambat dan birokratis menjadi sistem digital, e-Government memungkinkan penyelenggaraan layanan yang lebih cepat, aman, dan efektif. Ruang lingkupnya meliputi portal layanan daring, sistem informasi manajemen, hingga aplikasi yang mendukung koordinasi antarinstansi pemerintah, sehingga memfasilitasi komunikasi yang lebih efisien antara pemerintah dengan masyarakat dan pelaku bisnis (Choirunnisa et al., 2023).

Tujuan utama e-Government adalah menciptakan pemerintahan yang lebih responsif, terbuka, dan bertanggung jawab. Digitalisasi ini memungkinkan layanan publik, seperti pembayaran pajak, pengajuan dokumen, dan manajemen data administratif, menjadi lebih mudah diakses. Selain itu, e-Government bertujuan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan melalui mekanisme interaktif, seperti konsultasi publik atau survei daring. Dengan demikian, kesenjangan akses terhadap layanan pemerintah, khususnya bagi masyarakat di daerah terpencil, dapat ditekan (Pertwi et al., 2021).

E-Government juga memiliki manfaat strategis dalam memperkuat prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Sistem digital yang terintegrasi membantu mengurangi peluang korupsi, kolusi, dan nepotisme dengan menciptakan jejak digital atas setiap proses yang dilakukan. Selain itu, efisiensi operasional dapat dicapai melalui pengurangan biaya administrasi, memungkinkan pemerintah mengalokasikan anggaran untuk program prioritas. Di tingkat global, penerapan e-Government meningkatkan daya saing ekonomi suatu negara dengan menyederhanakan proses bisnis dan mendorong percepatan investasi dalam era digital (Muhajir et al., 2024).

B. Komponen Utama E-Government

E-Government adalah inovasi dalam pengelolaan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk meningkatkan efektivitas, keterbukaan, dan partisipasi masyarakat. Tiga komponen utama dalam E-Government yaitu E-Services, E-Administration, dan E-Democracy, saling mendukung untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Setiap komponen memiliki peran yang signifikan dalam membangun ekosistem pemerintahan digital yang inklusif dan berkelanjutan (Zahra et al., 2024).

- **E-Services (Layanan Publik Secara Digital)**

E-Services merujuk pada penyediaan layanan publik secara digital, yang memungkinkan masyarakat mengakses layanan pemerintah dengan lebih mudah. Contoh penerapan E-Services antara lain pembayaran pajak secara online, pengajuan izin usaha secara daring, serta layanan e-KTP. Dengan E-Services, masyarakat tidak perlu datang langsung ke kantor pemerintah, yang menghemat waktu dan biaya.

Selain itu, sistem ini meningkatkan transparansi karena data transaksi tercatat secara otomatis dan dapat diaudit. Namun, tantangan dalam penerapan E-Services termasuk kebutuhan akan infrastruktur teknologi yang memadai, integrasi data antar lembaga, serta pendidikan masyarakat agar dapat memanfaatkan layanan digital ini (Zakiah et al., 2024).

- E-Administration (Manajemen Administrasi Internal yang Transparan)

E-Administration berfokus pada peningkatan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan administrasi pemerintah. Teknologi digunakan untuk mengelola data pegawai, anggaran, dokumen, dan pengambilan keputusan secara digital. Sistem seperti e-budgeting, e-procurement, dan e-filing memungkinkan pemerintah untuk memonitor kegiatan secara langsung, mencegah pemborosan anggaran, serta mengurangi praktik korupsi. Dengan sistem ini, pengelolaan administrasi menjadi lebih terorganisir dan mudah untuk diaudit. Namun, keberhasilan E-Administration memerlukan dukungan regulasi yang kuat, pelatihan sumber daya manusia, serta perlindungan data agar sistem tidak disalahgunakan (Zahra et al., 2024).

- E-Democracy (Partisipasi Publik dalam Pengambilan Keputusan)

E-Democracy memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan pemerintah melalui platform digital. Partisipasi ini bisa berupa konsultasi publik, pemungutan suara online, atau pengajuan pendapat melalui portal resmi pemerintah. Contoh E-Democracy termasuk platform survei kebijakan dan forum diskusi daring yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan masukan langsung. E-Democracy meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah karena kebijakan yang diambil mencerminkan suara dan kebutuhan masyarakat. Tantangan dalam implementasi E-Democracy mencakup akses teknologi oleh masyarakat, keamanan data, serta upaya untuk mencegah penyalahgunaan platform seperti penyebaran hoaks (Haryani et al., 2024).

Ketiga komponen E-Services, E-Administration, dan E-Democracy harus terintegrasi dengan baik untuk menciptakan pemerintahan yang lebih responsif, transparan, dan inklusif. E-Services mempermudah pelayanan bagi masyarakat, E-Administration meningkatkan efisiensi di internal pemerintah, dan E-Democracy menjamin partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi. Penerapan E-Government yang sukses memerlukan komitmen kuat dari pemerintah, investasi dalam infrastruktur teknologi, serta kerjasama dengan berbagai pihak terkait. Dengan demikian, E-Government bukan hanya alat untuk meningkatkan pelayanan publik, tetapi juga pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif.

C. Transparansi Melalui E-Government

Keterbukaan melalui e-Government merujuk pada penerapan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan. Dengan memanfaatkan platform digital, pemerintah dapat menyediakan informasi yang lebih mudah diakses oleh publik, yang pada gilirannya dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan dan layanan yang disediakan. e-Government memfasilitasi komunikasi yang lebih efektif antara pemerintah dan masyarakat, memungkinkan interaksi dua arah serta memberikan akses langsung ke data publik yang relevan, seperti anggaran negara, laporan keuangan, dan hasil audit (Ilham et al., 2024).

Implementasi e-Government dalam meningkatkan transparansi pemerintahan memberikan dampak besar terhadap pengelolaan data dan informasi publik. Sebagai contoh, dengan adanya portal pemerintah daring, data yang sebelumnya terbatas dan

sulit diakses kini dapat diunduh dan diperiksa oleh siapa saja. Ini memberi kesempatan bagi masyarakat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dan mengidentifikasi potensi penyalahgunaan anggaran atau kebijakan yang tidak transparan. Penggunaan aplikasi dan sistem informasi terbuka juga memudahkan masyarakat untuk mengawasi penggunaan dana publik serta proyek-proyek pemerintah yang tengah berlangsung dengan pembaruan secara real-time (Tasyah et al., 2021).

Salah satu aspek kunci dari transparansi melalui e-Government adalah partisipasi aktif masyarakat dalam pembuatan kebijakan. Platform e-Government yang interaktif memungkinkan warga untuk memberikan masukan, bertanya, atau mengkritik kebijakan pemerintah. Dengan adanya saluran komunikasi yang mudah diakses, seperti aplikasi mobile atau website pemerintah, masyarakat dapat merasa lebih terlibat dalam pengambilan keputusan. Partisipasi ini tidak hanya meningkatkan keterbukaan, tetapi juga membantu pemerintah memahami kebutuhan dan aspirasi publik dengan lebih baik. Meski e-Government menawarkan berbagai keuntungan dalam hal transparansi, tantangan teknis dan sosial juga perlu diperhatikan. Salah satunya adalah masalah aksesibilitas, di mana tidak semua kelompok masyarakat memiliki kemampuan atau infrastruktur yang memadai untuk mengakses platform digital. Hal ini dapat menimbulkan ketimpangan informasi, di mana sebagian orang tidak dapat berpartisipasi dalam pengawasan atau proses pembuatan kebijakan. Selain itu, perlindungan data pribadi menjadi isu penting, karena semakin banyak informasi yang dibagikan secara digital, semakin tinggi risiko penyalahgunaan data pribadi atau kebocoran informasi sensitive (Haris & Enala, 2024).

Untuk memastikan e-Government dapat meningkatkan transparansi secara efektif, dibutuhkan regulasi dan kebijakan yang mendukung serta edukasi bagi masyarakat mengenai cara menggunakan teknologi ini. Pemerintah perlu menyediakan pelatihan agar masyarakat dapat mengakses dan memanfaatkan informasi yang tersedia secara optimal. Selain itu, pemerintah juga harus memastikan bahwa platform e-Government bukan hanya sekadar alat penyebaran informasi, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan akuntabilitas, di mana setiap kebijakan dan keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan dengan jelas kepada publik. Dengan demikian, e-Government akan menjadi instrumen yang kuat dalam membangun pemerintahan yang lebih transparan dan demokratis (Supriatna & Hadianti, 2024).

D. Akuntabilitas Melalui E-Government

Akuntabilitas dalam konteks e-Government merujuk pada pemanfaatan teknologi informasi untuk memperbaiki transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pemerintahan. Melalui sistem digital, e-Government memfasilitasi penyajian informasi yang lebih terbuka kepada publik, termasuk laporan keuangan, kebijakan, dan berbagai kegiatan pemerintahan yang dapat diakses secara daring oleh masyarakat. Dengan e-Government, pemerintah dapat memberikan penjelasan yang lebih rinci mengenai pengelolaan anggaran dan program-program yang sedang berlangsung, memudahkan masyarakat untuk memantau serta mengawasi kinerja pemerintah (Bao et al., 2024).

Penerapan e-Government meningkatkan akuntabilitas dengan meminimalkan potensi korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Sistem elektronik ini memungkinkan pencatatan yang lebih terstruktur dan mudah diaudit, serta mengurangi interaksi langsung antara petugas pemerintah dan masyarakat yang sering menimbulkan

penyalahgunaan wewenang. Proses pengajuan dan pelaporan juga menjadi lebih efisien dan terorganisir. Selain itu, e-Government menyediakan sarana bagi masyarakat untuk memberikan masukan atau melaporkan masalah serta kecurangan dalam pelayanan publik, memperkuat peran serta masyarakat dalam memastikan pemerintahan yang bersih dan efektif (Laming et al., 2023).

Pemeriksaan mengenai e-Government benar-benar dapat meningkatkan akuntabilitas, dibutuhkan dukungan infrastruktur teknologi yang memadai serta pelatihan bagi aparat pemerintah dalam mengoperasikan sistem tersebut. Tanpa kebijakan pendukung, seperti perlindungan data pribadi dan tindakan tegas terhadap pelanggaran, sistem ini berisiko tidak mencapai tujuannya. Oleh karena itu, selain mengimplementasikan teknologi, penting untuk membangun budaya pemerintahan yang terbuka, profesional, dan responsif terhadap kebutuhan serta keluhan masyarakat agar e-Government dapat berfungsi secara maksimal dalam meningkatkan akuntabilitas pemerintahan (Musri et al., 2024).

E. Tantangan Implementasi E-Government

Implementasi e-Government menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait dengan ketidakmerataan infrastruktur teknologi di berbagai wilayah, khususnya di daerah-daerah terpencil. Walaupun banyak kota besar di Indonesia telah mengembangkan layanan e-Government yang canggih, sejumlah daerah masih menghadapi masalah dengan konektivitas internet yang buruk atau terbatasnya akses teknologi yang memadai. Hal ini menyebabkan ketimpangan dalam penyediaan layanan publik berbasis digital. Oleh karena itu, pemerataan infrastruktur teknologi menjadi tantangan utama untuk memastikan bahwa semua kalangan masyarakat dapat merasakan manfaat dari e-Government (Nur & Ardiansyah, 2024). Selain itu, kurangnya kesiapan sumber daya manusia (SDM) dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) juga menjadi hambatan. Banyak pegawai pemerintah, terutama yang bertugas di daerah, belum terampil dalam mengoperasikan sistem berbasis digital, yang menghambat kelancaran pelaksanaan e-Government. Oleh karena itu, pelatihan dan peningkatan keterampilan SDM sangat penting agar mereka dapat mengelola sistem ini secara efektif. Selain itu, resistensi terhadap perubahan dari pegawai yang terbiasa dengan sistem manual juga bisa memperlambat proses adopsi teknologi baru ini (Maghfiroh, 2021).

Tantangan lainnya adalah masalah keamanan dan perlindungan data pribadi. Seiring berkembangnya e-Government, data warga dan informasi penting lainnya akan semakin banyak dikelola secara digital, meningkatkan risiko kebocoran data dan serangan siber. Pemerintah perlu memastikan adanya sistem keamanan yang kuat dan kebijakan perlindungan data yang tegas untuk menjaga privasi serta kepercayaan masyarakat. Hal ini memerlukan investasi besar dalam teknologi keamanan siber serta kebijakan yang jelas dan transparan untuk melindungi data dari potensi penyalahgunaan (Suari & Sarjana, 2023).

F. Strategi Implementasi yang Efektif

Strategi implementasi yang efektif mencakup langkah-langkah yang terencana dengan baik untuk mencapai tujuan atau kebijakan yang telah ditetapkan. Agar strategi ini berhasil, penting untuk memiliki perencanaan yang matang, yang mencakup tujuan yang jelas, alokasi sumber daya yang tepat, dan penetapan indikator kinerja yang dapat diukur. Perencanaan yang baik akan membantu pelaksanaan kegiatan secara terstruktur dan meminimalkan potensi kegagalan. Dalam hal ini, komunikasi yang efektif antar pihak yang terlibat sangat penting untuk memastikan

koordinasi yang lancar dalam melaksanakan setiap tugas (Faujiah et al., 2023).

Pengelolaan sumber daya yang optimal merupakan komponen kunci dalam strategi implementasi yang efektif. Sumber daya yang dimaksud tidak hanya mencakup dana, tetapi juga tenaga kerja, waktu, dan teknologi. Pengelolaan yang efisien dari sumber daya ini akan meningkatkan efektivitas program, karena setiap elemen dapat memberikan kontribusi terbaik. Oleh karena itu, pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi tim yang terlibat, serta penyediaan fasilitas yang mendukung, menjadi hal yang penting. Pengawasan yang ketat juga diperlukan untuk memastikan setiap langkah sesuai dengan perencanaan dan tidak menyimpang (Efendy & Ilvira, 2020).

Evaluasi dan penyesuaian berkala juga sangat penting dalam memastikan implementasi strategi yang efektif. Dalam proses implementasi, seringkali muncul hambatan atau perubahan yang mempengaruhi jalannya strategi. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme untuk menilai keberhasilan dan mengidentifikasi masalah yang muncul. Jika diperlukan, strategi harus dapat disesuaikan dengan kondisi dan tantangan baru. Dengan demikian, keberhasilan strategi implementasi dapat dicapai melalui pemanfaatan sumber daya yang efisien dan efektif serta penanganan tantangan yang ada (Winarto et al., 2023).

G. Manfaat E-Government bagi Transparansi dan Akuntabilitas

E-Government atau pemerintahan elektronik memberikan manfaat besar dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di sektor publik. Salah satu keuntungan utama dari penerapan e-government adalah kemudahan akses informasi bagi publik. Melalui platform digital, data dan informasi terkait pemerintah, seperti anggaran, kebijakan, dan program-program publik, dapat diakses secara online dan real-time oleh masyarakat. Ini memberi kesempatan bagi warga negara untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pemerintah secara langsung, yang pada gilirannya meningkatkan transparansi dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan (Muliawaty & Hendryawan, 2020).

E-government juga memperkuat akuntabilitas pemerintah melalui mekanisme pengawasan yang lebih efektif. Platform digital memungkinkan publik untuk melaporkan keluhan atau temuan terkait pelayanan publik secara cepat dan efisien. Dengan adanya sistem pelaporan online, setiap laporan atau aduan dapat segera dipantau dan ditindaklanjuti oleh instansi yang berwenang, sehingga mempercepat respons pemerintah terhadap masalah yang ada. Hal ini juga mengurangi potensi penyalahgunaan kekuasaan, karena setiap tindakan pemerintah dapat dengan mudah diawasi dan dilaporkan oleh masyarakat (Kristian et al., 2024).

Keuntungan lainnya adalah pengelolaan data yang lebih terstruktur dan terintegrasi. Dengan menggunakan sistem e-government, berbagai data yang sebelumnya terpisah dapat digabungkan dalam satu sistem yang mudah diakses dan dikelola. Ini memungkinkan pemerintah untuk membuat keputusan yang lebih tepat berdasarkan data yang akurat. Selain itu, integrasi data mempermudah pemantauan penggunaan anggaran dan sumber daya, sehingga memastikan dana publik digunakan dengan lebih efektif dan efisien. Secara keseluruhan, mekanisme ini memperkuat transparansi dalam pengelolaan pemerintahan dan meningkatkan akuntabilitas kepada publik (Ilhamsyah & Nuhari, 2024).

KESIMPULAN

Kesimpulan dari pembahasan ini menegaskan bahwa penerapan kebijakan e-government memiliki potensi yang sangat besar dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Melalui e-government, masyarakat dapat dengan mudah dan cepat mengakses informasi penting mengenai kebijakan, anggaran, dan program pemerintah, serta turut berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan melalui platform digital. Ini berkontribusi pada terciptanya pemerintahan yang lebih terbuka, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan publik, serta mengurangi kemungkinan terjadinya praktik korupsi dan penyalahgunaan anggaran.

Implementasi e-government juga dihadapkan pada sejumlah tantangan yang perlu diatasi. Kesenjangan digital, baik dalam akses teknologi maupun literasi digital masyarakat, menjadi kendala yang dapat menghambat efektivitas penerapan sistem ini. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mempercepat pembangunan infrastruktur yang merata dan program edukasi yang komprehensif agar masyarakat dan aparatur pemerintah dapat memanfaatkan teknologi digital secara maksimal. Selain itu, perlindungan data pribadi dan keamanan informasi harus menjadi perhatian utama agar e-government dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anita, A., & Astuti, S. I. (2022). Digitalisasi dan ketimpangan pendidikan: studi kasus terhadap guru sekolah dasar di Kecamatan Baraka. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 7(1), 1-12.
- Bao, B., Paramma, P. R. T., Nurak, A., & Ayomi, H. V. (2024). E-Government Dan Akuntabilitas Sistem Pemerintahan. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(4), 8013-8024.
- Batuara, L. V., Sasmita, I., & Silitonga, T. (2022). Implementasi Inovasi Kebijakan Smart City di Kota Tanjungpinang. *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 2(3), 231-147.
- Choirunnisa, L., Oktaviana, T. H. C., Ridlo, A. A., & Rohmah, E. I. (2023). Peran Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Dalam Meningkatkan Aksesibilitas Pelayanan Publik di Indonesia. *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial*, 3(1), 71-95.
- Efendy, I., & Ilvira, R. F. (2020). Implementasi Kesehatan Lingkungan Kampus Dalam Pandemi Covid 19 Untuk Mendukung Sdm Unggul, Indonesia Maju. *Prosiding WEBINAR Fakultas Ekonomi Unimed "Strategi Dunia Usaha Menyikapi Status Indonesia Sebagai Negara Maju: Pra dan Pasca Covid-19"*, 43-56.
- Faujiah, S., Syaifudin, M., & Andriani, T. (2023). Implementasi Manajemen Strategi dalam Lembaga Pendidikan. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 4(3), 641-650.
- Haris, U., & Enala, S. H. (2024). Peran Pemuda dalam Mendukung E-Government di Era Pemerintahan Berbasis Digital 5.0. *Papsel Journal of Humanities and Policy*, 1(2), 156-166.
- Haryani, P., Putri, N. T., & Jannah, L. M. (2024). Bandung Sadayana: Partisipasi Digital Masyarakat Kota Bandung dalam Membangun Smart City. *VISA: Journal of Vision and Ideas*, 4(1), 102-121.
- Ilham, D. S., Sfitri, A. W., Yahya, K., Sabrina, S. V., Madi, S., & Kasmita, T. (2024). Determinan Transparansi Pengelolaan Laporan Keuangan Daerah Melalui E-Government Pada Pemerintah Indonesia. *Jurnal Serambi Ekonomi dan Bisnis*, 7(2), 666-673.
- Ilhamsyah, P., & Nuhari, I. (2024). Reformasi Birokrasi di Indonesia: Dampak dan Tantangan dalam Implementasi Administrasi Publik yang Efektif. *Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online)*, 5(2), 1463-1476.
- Kristian, I., Nuradhawati, R., & Ristala, H. (2024). Peran E-Government Dalam Meningkatkan Transparansi Publik Di Indonesia (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Bandung).

- Jurnal Academia Praja: Jurnal Magister Ilmu Pemerintahan, 7(2), 252-263.
- Laming, R. F., Anwar, A. I., Rahmi, S., & Soumena, F. Y. (2023). Pengaruh e-government terhadap Pemberantasan Korupsi: Systematic Literatur Review. SEIKO: Journal of Management & Business, 6(1), 97-106.
- Maghfiroh, A. (2021). Analisis pengembangan sumber daya manusia dalam perspektif syariah. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7(1), 403-411.
- Muhajir, R., Abdurrahman, A., & Hidayatullah, H. (2024). Analisis Pelaksanaan Elektronik Government Sebagai Upaya Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance). Journal Law and Government, 2(2), 90-112.
- Muliawaty, L., & Hendryawan, S. (2020). Peranan e-government dalam pelayanan publik (studi kasus: Mal pelayanan publik Kabupaten Sumedang). Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi, 11(2), 45-57.
- Musri, M., Pasaribu, F. R., Khudri, N., Ariyati, Y., & Rahman, Y. (2024). Implementasi E-Government Dalam Meningkatkan Transparansi Dan Akuntabilitas Administrasi Negara. Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP), 7(3), 8888-8893.
- Musri, M., Pasaribu, F. R., Khudri, N., Ariyati, Y., & Rahman, Y. (2024). Implementasi E-Government Dalam Meningkatkan Transparansi Dan Akuntabilitas Administrasi Negara. Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP), 7(3), 8888-8893.
- Nur, M., & Ardiansyah, N. (2024). Menggali Potensi Road-Map Reformasi Birokrasi di Kabupaten Bima Pasca-PermenPAN-RB Nomor 3 Tahun 2023. Public Service and Governance Journal, 5(2), 138-151.
- Pertiwi, A., Dema, H., Mustanir, A., & Anugrah, E. (2021). Penerapan E-Government Dalam Mewujudkan Transparansi Tata Kelola Pemerintahan Desa (Studi Pada Pemerintahan Desa Bulu Timoreng). PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan, 9(3), 130-139.
- Ramadhania, A., & Sutisna, J. (2023). Penerapan E-Government Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Melalui Aplikasi Jakarta Kini (Jaki) dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Tahun 2022. NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 5(1), 29-48.
- Suari, K. R. A., & Sarjana, I. M. (2023). Menjaga Privasi di Era Digital: Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. Jurnal Analisis Hukum, 6(1), 132-142.
- Supriatna, D., & Hadianti, D. N. (2024). Studi Komparatif Implementasi E-Government Dalam Pelayanan Kesehatan: Pembelajaran Dari Berbagai Negara. Journal of Scientech Research and Development, 6(1), 1026-1041.
- Syuaib, M., Fauzi, M. F., & Abdillah, S. A. S. (2023). Evaluasi Implementasi E-Government Pada Situs Web Pemerintah Kota Parepare Menggunakan Metode Webqual 4.0. Journal of Software Engineering and Multimedia (JASMED), 1(2), 67-75.
- Tasyah, A., Lestari, P. A., Syofira, A., Rahmayani, C. A., Cahyani, R. D., & Tresiana, N. (2021). Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Digital (E-Government) di Era Pandemi Covid-19. Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi, 18(2), 212-224.
- Winarto, A., Mahmud, E., & Muadin, A. (2023). Manajemen Humas dalam Membangun Citra Lembaga: Studi Multisitus di STAI Sangatta dan STIPER Sangatta Kutai Timur. Sustainable Jurnal Kajian Mutu Pendidikan, 6(1), 159-169.
- Yunus, E. Y., Alvionita, N., Maulana, F. A., & Firmansyah, M. T. (2024). Peran Teknologi Informasi Dalam Meningkatkan Efektivitas Sistem Pemerintahan Lokal Di Era Digital. Journal of Innovation Research and Knowledge, 4(5), 3179-3190.
- Zahra, H., Santoso, S., & Kurniawan, I. A. (2024). Penerapan sistem informasi Pelayanan Publik Pada Aplikasi SIMPEL TKR PDAM Tirta Kerta Raharja Kabupaten Tangerang. Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK), 7(1), 87-98.
- Zakiah, R. U., Fadhillah, D. N., Gustina, R., Ratnasari, T., Hermawan, D., & Ramdani, F. T. (2024). Collaborative Governance dalam Kebijakan Publik melalui Aplikasi Akses Layanan Instan Kota Bogor (ASINAN BOGOR) Studi Kasus: Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor. Karimah Tauhid, 3(3), 3504-3511.